

PENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK GENERASI MUDA TERHADAP PELAKSANAAN PARTISIPASI POLITIK DI DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR¹

Oleh: Alex Victor Wanma²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran agen pendidikan politik terhadap pelaksanaan pendidikan politik generasi muda di distrik Samofa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak pendidikan politik generasi muda terhadap pelaksanaan partisipasi politik.

Data penelitian diperoleh melalui hasil observasi, kesediaan informan menjawab kuesioner dan juga studi literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian di atas. Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan peran agen terhadap pelaksanaan partisipasi politik generasi muda belum berjalan secara baik. Selanjutnya, pendidikan politik generasi muda belum memberi dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan partisipasi politik.

Melalui penelitian ini, peneliti menyarankan perlunya mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi politik secara berkala ke kampung-kampung/kelurahan di Distrik Samofa. Perlunya pemerintah dan stakeholder mengoptimalkan peran setiap agen pendidikan politik sebagai mitra bagi pelaksanaan pendidikan politik. Perlunya generasi muda diberi kesempatan serta tanggung jawab yang lebih luas dalam ruang publik seperti halnya dilibatkan sebagai anggota partai politik, ataupun organisasi sosial politik lainnya.

Kata kunci: Pendidikan Politik Generasi Muda dan Partisipasi Politik.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian.

Seorang filsuf Politik terkemuka Aristoteles dalam karyanya yang monumental “*Politics*,” pernah mengatakan bahwa manusia adalah “*Zoon Politicon*”, atau makhluk politik. Pandangan tersebut didasarkan pada fakta mengenai kondisi sosio-politis manusia yang hidup melalui adanya relasi politik dengan manusia lainnya. Suatu relasi politik dapat terwujud jika diantara manusia ada kesamaan kepentingan serta tujuan yang hendak dicapai bersama. Hubungan atas dasar kesamaan kepentingan serta tujuan politik inilah yang mendasari terbentuk kehidupan negara.

Kenyataan bahwa negara terbentuk dari hubungan-hubungan politik membawa dampak terjadinya proses politik sepanjang kelangsungan hidup negara. Karena itu, proses politik yang terjadi baik bentuk maupun intensitas tidak mungkin dihindari setiap warga dalam negara. Setiap warga negara pasti akan berhubungan atau bersinggungan dengan proses politik, entah itu disukai atau tidak disukai. Ini menunjukkan betapa proses politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan setiap warga dalam negara. Oleh karena

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

itu, sudah seyogianya setiap warga dalam negara untuk mengambil bagian atau berpartisipasi dalam setiap proses politik yang terjadi. Sebaliknya Jika warga negara tidak mengambil bagian dalam proses politik yang terjadi maka kepentingan politiknya sebagai warga negara akan terabaikan.

Di Negara Demokrasi partisipasi politik warga negara berangkat dari pemahaman bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat. Karena itu dalam implementasinya segala pengambilan keputusan politik harus melibatkan peran serta rakyat di dalamnya. Hal tersebut bertujuan agar setiap kebijakan politik yang nanti dihasilkan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi. Karena itu segala praktek penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasarkan pada kehendak rakyat. Secara eksplisit landasan konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara secara demokratis tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang telah dimandemen. Dalam pasal tersebut secara jelas dinyatakan bahwa "*Kedaulatan Negara berada Ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*". Dengan demikian, segala pengambilan keputusan politik haruslah bersumber pada kehendak rakyat.

Sebagai wujud real pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat ialah dengan melibatkan atau mengikutsertakan warga negara Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan politik.

Dalam konstitusi negara Republik Indonesia terdapat beberapa ketentuan yang menjadi Landasan yuridis pengakuan negara bagi pelaksanaan partisipasi politik warga negara. Dalam UUD 1945 hasil amandemen jaminan terhadap pelaksanaan partisipasi politik warga negara termuat pada pasal 22 e tentang pelaksanaan pemilihan Umum, pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, pasal 28 d tentang kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan serta pasal-pasal lainnya. Selain itu terdapat juga ketentuan undang undang mengenai jaminan pelaksanaan partisipasi politik seperti termuat dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan, UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif anggota DPR DPRD dan DPD serta UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden.

Akan tetapi menjadi persoalan saat ini di era pasca reformasi keikutsertaan warga negara dalam arena politik menampilkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya. Di beberapa daerah di Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat golput (golongan putih) akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figur yang ditawarkan. Selain itu, pelaksanaan partisipasi politik yang sehat masih terancam akan bahaya laten seperti penggunaan politik uang (money politics) dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Begitu pula, adanya dugaan permasalahan terkait proses mobilisasi massa di daerah-daerah terpencil yang masih terkendala akses informasi maupun netralitas proses pengawasan.

Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada akhir november 2013 menunjukkan minat masyarakat terhadap politik begitu rendah. LIPI

melaporkan 60 persen responden survei yang dilakukan lembaga itu di 31 provinsi dengan 1.799 orang responden menyatakan kurang tertarik dan tidak tertarik sama sekali terhadap politik, hanya sekitar 37 persen responden survei itu yang menyatakan tertarik atau sangat tertarik terhadap masalah politik atau pemerintahan.

Permasalahan rendahnya minat masyarakat Indonesia terhadap persoalan politik dijelaskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Husni Kamil Malik, sebagai berikut: "*Kami sekarang dihadapkan pada masalah partisipasi pemilih. Sejak Pemilu 1999 hingga 2009 grafik partisipasi pemilih terus menurun*". Selanjutnya, Husni menjelaskan bahwa, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 sebesar 92,74 persen, pada Pemilu 2004 sebesar 84,07 persen, dan Pemilu 2009 sebesar 71 persen. Selain itu penurunan partisipasi pemilih juga berimbas kepada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Secara nasional pemilihan kepala daerah mengalami penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah yakni 55-56%.

Permasalahan menurunnya kualitas serta kuantitas partisipasi politik masyarakat di era pasca reformasi sebenarnya menjadi indikasi kuat belum mendalamnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya hak politik yang dipunyai. Ini merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan segera. Jika persoalan mengenai rendahnya kesadaran politik tidak segera diatasi, maka persoalan ini dapat dianggap sebagai antitesis terhadap cita-cita reformasi yaitu untuk meyelenggarakan kekuasaan negara bagi kepentingan rakyat.

Permasalahan terkait masih rendahnya kualitas bahkan kuantitas partisipasi politik di Indonesia sebenarnya bertolak belakang dengan potensi bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara demokrasi yang besar. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar merupakan potensi terpendam yang perlu diberdayakan jika ingin menjadi sebuah negara demokrasi terbesar di dunia. Potensi penduduk Indonesia yang perlu diberdayakan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara ialah generasi muda. Setidaknya ada dua alasan utama yang mendasari, yaitu:

Pertama, Potensi jumlah pemilih usia muda. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) tahun 2013 saja, jumlah penduduk usia muda di Indonesia adalah sebanyak 62.985.401 jiwa atau 29,5 (%) persen dari total populasi 213,287 juta jiwa penduduk Indonesia. Bahkan jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun. Dari segi kuantitas angka tersebut menjadi indikasi betapa potensialnya jumlah pelaku politik usia muda di Indonesia.

Kedua, Fakta bahwa generasi muda sebagai pelopor gerakan perubahan kearah perbaikan suatu bangsa. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa perintis berbagai gerakan perubahan politik bangsa selalu diawali oleh generasi muda. Perjuangan generasi muda sudah dimulai sebelum hingga mencapai masa kemerdekaan. Bahkan generasi muda menjadi motor utama pada gerakan reformasi yang menggulingkan pemerintahan otoriter orde baru yang telah berkuasa 32 tahun. Karena itu tepat generasi muda dijuluki sebagai "agent of social change", atau generasi yang dapat memelopori suatu perubahan kearah perbaikan suatu bangsa.

Dipilihnya Distrik Samofa sebagai lokasi penelitian karena beberapa aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan partisipasi politik warga negara khususnya generasi muda diduga bermasalah. Karena itu permasalahan ini perlu diangkat melalui penelitian ini dengan tujuan melakukan kajian serta pemecahan terhadap masalah.

Berdasarkan observasi awal (pra observasi) dilokasi penelitian serta studi literatur yang terkait dengan permasalahan di atas didapati fakta permasalahan berupa gejala-gejala partisipasi politik generasi muda sebagai berikut.

Partisipasi politik generasi muda dalam turut serta merumuskan kebijakan dalam rapat-rapat di beberapa kampung/kelurahan di distrik samofa belum dapat dikategorikan berjalan secara baik. Hal tersebut terindikasi dari masih kurang/rendahnya intensitas kehadiran dalam rapat-rapat kampung/kelurahan serta masih tampak kurangnya usul saran dalam setiap kehadiran. Namun demikian rendah/kurangnya intensitas keterlibatan serta minat generasi muda dapat dipengaruhi juga oleh rendahnya frekuensi pertemuan rapat desa/kelurahan yang diadakan di kampung/ kelurahan di distrik samofa.

Selanjutnya Partisipasi Politik Generasi Muda di Distrik Samofa pada pemilihan kepala daerah kabupaten Biak Numfor periode 2008-2013, 2013-2018 total jumlah pemilih usia generasi muda berjumlah 12.576 atau 61,11% jiwa dari total 20.576 jiwa penduduk distrik samofa yang terdapat di KPUD Kabupaten Biak Numfor. Kemudian total pemilih generasi muda yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pilkada periode 2008-2013 berjumlah total 8.500 atau 67,5% total pemilih generasi muda. Pada pelaksanaan pilkada berikut periode 2013-2018 angka ini mengalami penurunan menjadi 8.484 atau 67,4% dari total pemilih generasi muda yang terdaftar resmi di KPUD Kabupaten Biak Numfor (kpudkab.biak numfor2013). Artinya partisipasi politik generasi muda melalui pelaksanaan pilkada terus mengalami penurunan.

Kemudian keterlibatan Generasi muda dalam organisasi sosial politik dan partai politik yang ada di Distrik Samofa dan kabupaten Biak Numfor juga belum begitu tinggi. Dari data KPUD Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 jumlah partai politik yang tercatat resmi sebanyak 18 partai. Akan tetapi kepengurusan dan keanggotaan parpol masih didominasi oleh para tokoh politik senior seperti Pensiunan Birokrat, Pensiunan ABRI ataupun Pensiunan POLRI. Berdasarkan deskripsi permasalahan penelitian terkait masih rendahnya kualitas serta kuantitas partisipasi politik generasi muda di Distrik Samofa, penulis berminat mengangkat judul bagi penelitian ini yakni *"Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor"*.

Rumusan Masalah

Menurut Usman dan Purnomo (2004:26-27), ialah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahannya. Perumusan masalah merupakan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah atau dengan kata lain, perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup, masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Perumusan masalah yang baik berarti telah menjawab setengah pertanyaan (masalah).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana Peran agen pendidikan politik terhadap pelaksanaan Pendidikan Politik Generasi Muda.
2. Bagaimana Dampak Pendidikan Politik Generasi Muda terhadap pelaksanaan Partisipasi Politik.

Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui Dampak Pendidikan politik Generasi Muda terhadap pelaksanaan partisipasi politik generasi muda.

Manfaat Penelitian.

Manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi bagi penelitian dan pengembangan ilmu politik.
2. Bagi Pemerintah dan Masyarakat.
Sebagai bahan masukan/evaluasi serta bahan perbandingan bagi proses pembuatan kebijakan Pemerintah daerah maupun Stakeholder dan segenap komponen masyarakat yang memiliki konsepsi terhadap pelaksanaan pembangunan partisipasi politik dikalangan generasi muda di Distrik Samofa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Politik.

1. Pengertian Pendidikan.

Istilah pendidikan berasal dari kata *education* (pendidikan) yang berasal dari *educate* (mendidik) artinya memberi peningkatan (*to elict, to give, rise to*) dan mengembangkan (*to eleve, to develop*). Dalam pengertian yang sempit *education* atau pendidikan berarti perbuatan atau proses pembuatan untuk memperoleh pengetahuan.

Menurut Poerwadarminta (1996:2006), kata pendidikan berasal dari kata "*didik*" yang dapat berarti "*memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran*". Sehingga dalam kata pendidikan itu mengandung beberapa arti, yaitu:

- 1) Perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik;
- 2) (Ilmu, ilmu didik, ilmu mendidik) Mendidik;
- 3) Pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya), badan, batin dan sebagainya.

2. Bentuk-Bentuk Pendidikan.

Menurut Combs (1976:2) Pendidikan dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1) Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang kita kenal dengan pendidikan sekolah yang bersifat teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas.
- 2) Pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang teratur dengan sadar dilaksanakan, tetapi berlaku mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan tepat.
- 3) Pendidikan Informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman-pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seseorang lahir sampai mati, baik dalam pergaulan maupun dalam pekerjaan sehari-hari.

3. Pengertian Politik.

Secara etimologi kata "*Politik*" berasal dari bahasa Yunani, yakni "*Polis*", yang dapat berarti kota atau negara kota. Dari kata *polis* ini kemudian diturunkan pada kata-kata seperti *polites* yang berarti warga negara; *politicos* (nama sifat) yang berarti

kewarganegaraan(civic),*politike techne* yang berarti kemahiran politik dan *politike episteme* yang berarti Ilmu Politik, dan lain sebagainya..

Kemudian mochtar affandi (1971:50), berpendapat bahwa yang dimaksud dengan politik sebenarnya ialah usaha-usaha yang dijalankan oleh para warga negara untuk mencapai kekuasaan dalam negara.

Selain itu terdapat definisi lain dari para sarjana,namun setidaknya unsur-unsur pokok politik politik pada dasarnya ialah menyangkut soal-soal negara,kekuasaan,pengambilankeputusan,kebijakan dan pembagian atau alokasi.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Budiardjo(2008:16-17) disamping itu ada definisi lain yang bersifat pragmatis.Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik.Unsur ini diperlukan sebagai unsur pokok yang akan dipakai untuk meneropong unsur-unsur lain.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa konsep pokok itu adalah :

- 1.Negara(state).
2. Kekuasaan(power).
- 3.Pengambilan keputusan(decision making).
- 4.Kebijakan(policy,beleid)
- 5.Pembagian (Distribution) atau Alokasi (allocation).

4. Definisi Pendidikan Politik.

Istilah Pendidikan Politik berasal dari bahasa inggris yaitu,Political socialization.Jika ditelusuri pada berbagai literatur politik yang ada Pendidikan Politik termasuk bagian proses sosialisasi politik.Walaupun berbeda secara penulisan,baik sosialisasi politik maupun pendidikan politik mempunyai tujuan serta fungsi yang sama secara prinsip.Karena itu dalam dalam penulisan ini baik sosialisasi politik ataupun pendidikan politik dipergunakan bersama tanpa diperdebatkan.

Menurut Rusadi Kantaprawira(2004:55),pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi,rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Selanjutnya untuk tujuan pendidikan politik bagi generasi muda dituangkan dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa:

Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

5. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik.

Menurut Rusadi Kantaprawira(2004:56) bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).

3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

6. Materi Pendidikan Politik.

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan politik mengacu pada dasar hukum konstitusi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian seluruh materi pendidikan politik harus mengacu pada amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak terkecuali pada pelaksanaan bagi pendidikan politik generasi muda. Di Indonesia materi serta kurikulum bagi proses pendidikan politik generasi muda diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik antara lain:

- a. Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara,
- b. Kehidupan dan kerukunan hidup beragama;
- c. Motivasi berprestasi;
- d. Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik;
- f. Disiplin pribadi, sosial, dan nasional;
- g. Kepercayaan pada pemerintah;
- h. Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.

7. Sarana (agen-agen) Pendidikan Politik.

Menurut Colin Mac Andrews dan Mochtar Mas'ud (1978:35-37), sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga. Beberapa diantaranya, seperti pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah, dengan sengaja dirancang demi tujuan sosialisasi politik, disamping juga untuk tujuan lain. Lainnya, seperti kelompok bergaul dan bekerja, hanya cenderung untuk mempengaruhi sosialisasi secara tidak langsung.

a. Keluarga.

Pengaruh keluarga baik yang langsung maupun yang tidak langsung—yang merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang—sangat kuat dan kekal. Yang paling jelas pengaruh dari keluarga ini adalah dalam pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan (authority). Keluarga biasanya membuat keputusan bersama, dan bagi si anak keputusan yang dibuat itu bisa otoritatif, dalam arti keengganan untuk mematuhi dapat mengundang hukuman. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan luas; dengan membentuk ikatan-ikatan etnis, linguistik, religius, dan kelas sosialnya; dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural dan pendidikannya; dan dengan mengarahkan aspirasi-aspirasi pekerjaan dan ekonomisnya.

b. Sekolah.

orang yang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik, dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya.

Sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka didalamnya. Sekolah memberi pandangan yang lebih kongkrit tentang lembaga lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan "saluran pewarisan" nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat. Sekolah dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap "aturan permainan politik" (rule of the political game) yang tak tertulis, seperti sekolah-sekolah negeri di Inggris yang secara tradisional menanamkan nilai-nilai kewajiban warga negara, hubungan politik informal, dan integritas politik. Sekolah dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dan memberikan simbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap sistem itu, seperti bendera nasional, dan ikrar kesetiaan "Padamu Negeri". Pengajaran sejarah nasional juga berfungsi memperkuat kesetiaan kepada sistem politik.

c. Kelompok pergaulan.

Meskipun sekolah dan keluarga merupakan sarana yang paling jelasterlibat dalam proses sosialisasi, adajuga beberapa unit sosial lain yang bisa membentuk sikap-sikap politik seseorang. Salah satunya adalah kelompok pergaulan, termasuk kelompok bermain dimasa kanak-kanak, kelompok persahabatan, dan kelompok kerja yang kecil, dimana setiap anggota mempunyai kedudukan yang relatif sama dan saling memiliki ikatan-ikatan yang erat. Setiap individu dalam kelompok itu menyesuaikan pendapatnya dengan teman temannya mungkin karena ia menyukai atau menghormati mereka, atau mungkin pula karena ia ingin sama dengan mereka. Jadi kelompok pergaulan itu mensosialisasikan anggota-anggotanya dengan cara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompok itu. Seseorang mungkin menjadi tertarik pada politik, atau mulai mengikuti peristiwa-peristiwa politik karena teman-temannya berbuat begitu. Seseorang anak lulusan sekolah menengah mungkin memilih masuk ke suatu perguruan tinggi karena pelajar-pelajar lain temannya berbuat serupa. Dalam hal-hal ini individu tersebut merubah kepentingan dan tingkahlakunya agar sesuai dengan kelompoknya sebagai usaha agar ia tetap diterima oleh anggota-anggota kelompok itu.

d. Pekerjaan.

Pekerjaan—dan organisasi-organisasi formil maupun non formil yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu, seperti serikat buruh, klub sosial, dan yang yang semacam itu—juga merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas. Individu-individu mengidentifikasi diri dengan suatu kelompok tertentu, seperti serikat buruh, dan menggunakan kelompok itu sebagai "penyuluh" (reference) dalam kehidupan politik. Mereka menjadi sensitif terhadap norma-norma kelompok itu dan menilai tindakan-tindakannya berdasar apa yang paling baik bagi kelompok itu.

Berpartisipasi dalam dalam suatu tawar menawar kolektif atau dalam suatu demonstrasi dapat merupakan pengalaman sosialisasi yang berkesan mendalam baik bagi pihak buruh maupun pihak majikan. Buruh yang berdemonstrasi dapat mengetahui bahwa ia dapat mempengaruhi bentuk keputusan yang akan mempengaruhi masa depannya yang sedang dibuat, disamping ia juga dapat memperoleh pengetahuan tentang kecakapan-

kecakapan bertindak tertentu, seperti berdemonstrasi dan mogok, yang bisa berguna kalau ia berpartisipasi lagi dalam bentuk-bentuk kegiatan politik lain.

e. Media massa.

Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang luas, cepat, dan secara umum seragam. Informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dimana saja di dunia segera menjadi pengetahuan umum dalam beberapa jam saja. Sebagian besar masyarakat dunia—terutama bagian-bagiannya yang modern—telah menjadi satu kelompok penonton yang tunggal, yang tergerak hatinya oleh peristiwa-peristiwa yang sama dan dirangsang oleh selera yang sama. Kita tahu bahwa media massa—surat kabar, radio, televisi, majalah—memegang peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa baru merdeka.

Disamping memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa politik, media massa juga menyampaikan, langsung maupun tidak, nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakatnya. Beberapa simbol tertentu disampaikan dalam suatu konteks emosional, dan peristiwa-peristiwa yang di gambarkan disekitar simbol itu menjadi warna yang emosional. Karena itu, sistem media massa yang terkendali merupakan sarana kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan politik.

f. Kontak politik langsung.

Tidak peduli betapa positif pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga, atau sekolah, tetapi bila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, dan dipaksa masuk wajib militer, pandangannya terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai politik, kampanye pemilihan umum, krisis-krisis politik luar negeri dan perang, dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan individu dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan mereka untuk mematuhi hukum.

Partisipasi Politik.

1. Definsi Partisipasi Politik.

Secara etimologi kata partisipasi berasal dari kata latin "*Pars*" dan "*capere*". *Pars*", berarti bagian-bagian dan *capere* berarti mengambil, ikutserta. Jadi diartikan partisipasi adalah "ikut serta mengambil bagian". Kemudian dalam bahasa Inggris, disebut participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:367), sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih peminan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik.

Menurut Colin Mc Andrews dan Mochtar Mas' oed (1978:42-43) partisipasi politik terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni secara Konvensional dan Non Konvensional. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

1. partisipasi politik secara Konvensional adalah Pemberian suara(voting), Diskusi politik, Kegiatan kampanye, Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, Komunikasi individu dengan pejabat politik dan administrasi.

2. Partisipasi Politik secara non Konvensional adalah Pengajuan petisi Demonstrasi, Konfrontasi mogok, Tindakan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, perang gerilya dan revolusi

Menurut pendapat mereka bentuk partisipasi politik "Konvensional" adalah bentuk partisipasi yang "Normal" dalam demokrasi modern. Sedangkan bentuk partisipasi politik "Non Konvensional" termasuk beberapa yang mungkin legal seperti petisi maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

3. Sifat Partisipasi Politik.

Menurut Huntington dan Nelson sebagaimana dikutip Budiardjo (2008:370) partisipasi politik dapat bersifat Otonomi dan Mobilisasi.

1. Partisipasi politik yang bersifat Otonom (*Autonomous Participation*) yaitu partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga untuk menentukan pilihan.

2. Partisipasi politik yang bersifat Mobilisasi (*Mobilized Participation*) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain.

Jadi partisipasi politik otonom dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran politik setiap orang tanpa adanya paksaan, ancaman ataupun pengerasan. Partisipasi politik otonom murni muncul atas dorongan atau kehendak pribadi. Sedangkan partisipasi politik yang dimobilisasi merupakan partisipasi politik yang dilakukan oleh karena dikerahkan. Biasanya partisipasi yang di mobilisasi tidak berdasarkan pada kesadaran pribadi, tetapi terjadi melalui paksaan, ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya dengan maksud mengubah pilihan warga.

4. Aspek-Aspek Penentu Partisipasi Politik.

a. Aspek-aspek yang mendorong pelaksanaan partisipasi politik lebih luas.

Menurut Mochtar Mas' oed & Colin Mac Andrews, (1978: 46-47) di kebanyakan negara, *pendidikan tinggi* sangat mempengaruhi partisipasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa bisa mengembangkan kecakapan menganalisa, dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik.

Perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik misalnya laki-laki lebih aktif dari pada wanita; orang yang berstatus sosial lebih tinggi lebih aktif dari pada yang berstatus lebih rendah.

Peran partai politik berpengaruh besar dalam partisipasi politik rakyat. Di Amerika Serikat, orang yang berpartai lebih besar sering memberikan suara dari pada yang tidak berpartai; orang yang setia kepada partainya lebih aktif lagi. Aktivitas kampanye mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan kaum pemilih (*electorate*) untuk berpartisipasi politik tidaklah begitu jelas. Biasanya kampanye-kampanye politik hanya dapat mencapai pengikut setia partai, dengan memperkuat komitmen mereka untuk memberikan suara.

b. Aspek-aspek penghambat /Penyebab (alasan) Orang Menghindari Kehidupan Politik.

Moris Rosenberg mengemukakan tiga alasan, mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Pertama, karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktifitas politik. Disini orang beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan ancaman terhadap kehidupan.

Kedua, karena orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kesia-siaan. Dianggap, karena partisipasinya tidak akan mempengaruhi proses politik.

Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Disini orang, misalnya, tidak menghargai gagasan-gagasan politik. Tak ada hasil yang bisa dipetik dari partisipasi tersebut, maka orang pun enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Generasi Muda.

Menurut Poerwadarminta (1976:314), "Generasi" dapat diartikan dengan: masa orang-orang tersebut hidup. Sedangkan kata "Muda" menurut beliau adalah belum sampai setengah umur, atau masih muda.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui pentingnya pendidikan politik generasi muda terhadap pelaksanaan partisipasi politik di distrik samofa kabupaten biak numfor.

Fokus Penelitian.

Penetapan fokus penelitian ini didasarkan sumber berikut ini:

Agen pendidikan politik merupakan sarana pendidikan politik sebagaimana dikemukakan Colin Mac Andrews dan Mochtar Mas' oed diantaranya adalah :keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, lingkungan pekerjaan, media massa, kontak politik langsung.

Peran agen terhadap pelaksanaan pendidikan politik generasi muda sebagaimana tertuang dalam Selanjutnya Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda .

Dengan demikian focus penelitian ini diarahkan pada beberapa hal berikut:

1. Peran agen terhadap pelaksanaan pendidikan politik generasi muda.
2. Dampak Pendidikan Generasi Muda politik terhadap pelaksanaan partisipasi politik.

Tempat Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di beberapa kampung (desa)/kelurahan yang ada di wilayah Distrik Samofa (kecamatan), Kabupaten Biak Numfor. Dari sejumlah kampung (desa)/kelurahan yang ada peneliti menentukan beberapa diantaranya sebagai lokasi yang situasi sosialnya akan diteliti, yaitu:

1. Kelurahan Brambaken.
2. Kampung (desa) Yafdas.
3. Kampung (desa) Darfuar.
4. Kampung (desa) Mandow.
5. Kampung (desa) Sambawfuar.

Teknik Pengumpulan Data.

Teknik penumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, dilakukan dengan pengamatan langsung dilokasi penelitian. Pengamatan dilakukan pada masa awal penelitian untuk menemukan serta menentukan masalah pokok penelitian hingga pelaksanaan penelitian ini berakhir.
2. Kuesioner, berupa daftar pertanyaan, dilakukan dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada setiap responden yang telah ditentukan untuk di isi atau dijawab sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.
3. Studi Kepustakaan/Literatur, berupa data hasil pencatatan, data statistik dilokasi penelitian, serta, berbagai literatur atau sumber bacaan yang relevan dengan masalah penelitian.

Teknik Analisa Data.

Setelah melewati tahapan pengumpulan data dilapangan, langkah selanjutnya adalah mengolah data. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik analisa data ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dikutip Sugiyono (2009:91) menyebutkan bahwa, aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisa data deskriptif kualitatif, yaitu reduksi data, display data serta kesimpulan/verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Agen Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Politik Generasi muda di distrik Samofa.

1. Peran Keluarga

Informasi politik mengenai Pemilu, Pilkada, Pilcaleg. Untuk mengetahui pemahaman generasi muda mengenai hal tersebut diajukan pertanyaan: Apakah dilingkungan keluarga anda sering berdiskusi tentang pelaksanaan pemilu/ pilkada/ pilcaleg, total 89 reponden generasi muda atau total 90% reponden menjawab sering berdiskusi dilingkungan keluarga. Selanjutnya pada pertanyaan berikut, Apakah pelaksanaan diskusi tersebut sangat membantu pemahaman anda pada perihal tersebut. Diketahui bahwa 55 responden generasi muda atau total 61% responden memberi jawaban diskusi dilingkungan keluarga belum membantu memberi pemahaman.

Informasi politik mengenai peranan serta fungsi organisasi sosial politik ataupun Partai Politik. Untuk mengetahui pemahaman generasi muda mengenai hal tersebut diajukan pertanyaan: Apakah dilingkungan keluarga anda sering berdiskusi tentang Peran serta fungsi Partai Politik 75 atau total 83% responden generasi muda menjawab sering berdiskusi. Pada pertanyaan selanjutnya, Apakah pelaksanaan diskusi tersebut sangat membantu pemahaman anda pada perihal tersebut, 62 reponden generasi muda atau 72% reponden menjawab diskusi

dilingkungan keluarga belum membantu memberi pemahaman tentang peran serta fungsi organisasi sosial politik ataupun partai politik.

Informasi Politik mengenai proses pembuatan kebijakan politik didesa/kelurahan. Untuk mengetahui pemahaman generasi muda mengenai hal tersebut diajukan pertanyaan: Apakah di lingkungan keluarga anda sering berdiskusi tentang pembuatan kebijakan politik didesa/kelurahan, sebanyak 89 responden generasi muda atau 98% responden sering berdiskusi. Pada pertanyaan berikut: Apakah pelaksanaan diskusi tersebut sangat membantu pemahaman anda pada proses pembuatan kebijakan politik didesa atau kelurahan. Sebanyak 80 atau 88% responden generasi muda menjawab sangat membantu.

2. Peran lingkungan pekerjaan.

Informasi politik mengenai Pemilu, Pilkada, Pilcaleg. Untuk mengetahui pemahaman generasi muda mengenai hal tersebut diajukan pertanyaan: Apakah di lingkungan pekerjaan anda sering berdiskusi tentang pelaksanaan pemilu/ pilkada/ pilcaleg, total 65 responden generasi muda atau total 72% responden menjawab sering berdiskusi di lingkungan kerja. Selanjutnya pada pertanyaan berikut, Apakah pelaksanaan diskusi tersebut sangat membantu pemahaman anda pada perihal tersebut. Diketahui bahwa 55 responden generasi muda atau total 61% responden memberi jawaban diskusi di lingkungan kerja belum membantu memberi pemahaman.

Informasi politik mengenai peranan serta fungsi organisasi sosial politik ataupun Partai Politik. Untuk mengetahui pemahaman generasi muda mengenai hal tersebut diajukan pertanyaan: Apakah di lingkungan kerja anda sering berdiskusi tentang Peran serta fungsi Partai Politik 63 atau total 70% responden generasi muda menjawab sering berdiskusi. Pada pertanyaan selanjutnya, Apakah pelaksanaan diskusi tersebut sangat membantu pemahaman anda pada perihal tersebut, 60 responden generasi muda atau 66% responden menjawab diskusi di lingkungan kerja belum membantu memberi pemahaman tentang peran serta fungsi organisasi sosial politik ataupun partai politik.

Informasi Politik mengenai proses pembuatan kebijakan politik didesa/kelurahan. Untuk mengetahui pemahaman generasi muda mengenai hal tersebut diajukan pertanyaan: Apakah di lingkungan kerja anda sering berdiskusi tentang pembuatan kebijakan politik didesa/kelurahan, sebanyak 79 responden generasi muda atau 87% responden sering berdiskusi. Pada pertanyaan berikut: Apakah pelaksanaan diskusi tersebut sangat membantu pemahaman anda pada proses pembuatan kebijakan politik didesa atau kelurahan. Sebanyak 79 atau 72% responden generasi muda menjawab sangat membantu.

3. peran lingkungan pergaulan.

Informasi politik mengenai Pemilu, Pilkada, Pilcaleg. Untuk mengetahui pemahaman generasi muda mengenai hal tersebut diajukan pertanyaan: Apakah di lingkungan pergaulan anda sering berdiskusi tentang pelaksanaan pemilu/ pilkada/ pilcaleg, total 75 responden generasi muda atau total 83% responden menjawab sering berdiskusi di lingkungan pergaulan. Selanjutnya pada pertanyaan berikut, Apakah pelaksanaan diskusi tersebut sangat membantu pemahaman anda pada perihal tersebut. Untuk pertanyaan tersebut 65 responden generasi muda atau total 72% responden memberi jawaban diskusi di lingkungan pergaulan membantu memberi pemahaman.

Informasi politik mengenai peranan serta fungsi organisasi sosial politik ataupun Partai Politik. Untuk mengetahui pemahaman generasi muda mengenai hal tersebut diajukan pertanyaan: Apakah dilingkungan pergaulan anda sering berdiskusi tentang Peran serta fungsi Partai Politik. Untuk pertanyaan penelitian tersebut total 69 atau 76% responden generasi muda menjawab sering berdiskusi. Pada pertanyaan selanjutnya, Apakah pelaksanaan diskusi tersebut sangat membantu pemahaman anda pada perihal tersebut, 57 responden generasi muda atau 63% responden menjawab diskusi dilingkungan pergaulan membantu memberi pemahaman tentang peran serta fungsi organisasi sosial politik ataupun partai politik.

Informasi Politik mengenai proses pembuatan kebijakan politik di desa/kelurahan. Untuk mengetahui pemahaman generasi muda mengenai hal tersebut diajukan pertanyaan: Apakah dilingkungan pergaulan anda sering berdiskusi tentang pembuatan kebijakan politik di desa/kelurahan, sebanyak 67 responden generasi muda atau 74% responden sering berdiskusi. Pada pertanyaan berikut: Apakah pelaksanaan diskusi tersebut sangat membantu pemahaman anda pada proses pembuatan kebijakan politik di desa atau kelurahan. Sebanyak 73 atau 81% responden generasi muda memberi jawab sangat membantu.

Dampak Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik.

Pada pertanyaan penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh pendidikan politik di lingkungan keluarga terhadap peningkatan partisipasi politik adalah sebagai berikut. Dari total 90 orang responden, secara dominan 75 atau 83% responden generasi muda, menyatakan bahwa pendidikan politik di lingkungan keluarga sangat mempengaruhi tindakan partisipasi politiknya.

Selanjutnya, pada pertanyaan penelitian kedua dengan maksud mengetahui pengaruh pendidikan politik di lingkungan kerja terhadap peningkatan partisipasi politik, diketahui bahwa secara dominan 65 responden atau 72% responden generasi muda menyatakan pendidikan politik di lingkungan kerja sangat mempengaruhi tindakan partisipasi politiknya.

Pada pertanyaan penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh pendidikan politik di lingkungan pergaulan terhadap pelaksanaan partisipasi politik menunjukkan hasil sebagai berikut. Dari total 90 orang responden, sebanyak 58 atau 65% responden generasi muda, menyatakan bahwa pendidikan politik di lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi tindakan partisipasi politiknya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pendidikan politik yang dilakukan agen pendidikan politik di Distrik Samofa belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terindikasi pada hasil penelitian yang menunjukkan belum maksimalnya peranan agen pendidikan politik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pelaksanaan partisipasi politik generasi muda.
2. Pendidikan Politik yang dilaksanakan melalui agen pendidikan politik belum memberikan dampak/pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik generasi muda. Hal tersebut terindikasi pada hasil penelitian yang menunjukkan Pendidikan Politik yang dilaksanakan agen pendidikan politik belum secara optimal mempengaruhi partisipasi politik generasi muda pada aktifitas politik.

Saran.

1. Untuk mewujudkan partisipasi politik secara maksimal dapat dilakukan dengan mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi politik secara berkala ke kampung-kampung/kelurahan di distrik samofa.
2. Perlunya pemerintah dan stake holder mengoptimalkan peran agen pendidikan sebagai mitra bagi pelaksanaan pendidikan politik.
3. Perlunya generasi muda diberi kesempatan serta tanggung jawab yang lebih luas dalam ruang publik seperti halnya dilibatkan sebagai anggota partai politik, ataupun organisasi sosial politik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi Mochtar,1971.**Himpunan Kuliah Ilmu Ilmu Kenegaraan**,Alumni Bandung
- Alfian.1990.**Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia**,KumpulanKarangan, PT.Gramedia,Jakarta.
- Almond Gabriel &Sidney Verba.1984.**Budaya Politik (Tingkah Laku dan Demokrasi di Lima Negara)**,Bina Aksara, Jakarta.
- Arifin Rahman,1998.**Sistem Politik Indonesia,Dalam Perspektif StrukturalFungsional**,SIC.Surabaya.
- Bagong Suyanto & Sutinah,2006.**Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan**,Kencana Prenada Media Grup,Jakarta.
- Budiardjo Miriam,2008.**Dasar Dasar Ilmu Politik**,Edisi Revisi,PT.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
- Cheppy Haricahyono,1986.**Ilmu Politik dan Perspektifnya**,Tiara Wacana,Yogyakarta,
- Hasbulah,2005.**Dasar Dasar Ilmu Pendidikan** Edisi Revisi,PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Joesoef,Soelaiman,2008.**Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah**,PT.Bumi Aksara. Jakarta.
- Kantaprawira Rusadi,2004.**Sistem Politik Indonesia,Suatu Model Pengantar**,Edisi Revisi,Sinar baru Algensindo,Bandung.
- Kurniadi,Edi.H,1991.**Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik Di Indonesia**, Penerbit Angkasa Bandung.
- Maran Rafael.R.2001.**Pengantar Sosiologi Politik**,RinekaCipta.Jakarta.
- Mas'oeud Mochtar & Colin Mac Andrews .1978,**Perbandngan Sistem Politik**, Gajah Mada University Press,Yogyakarta.
- Murtopo Ali .1974,**Psikologi dan Periodik Generasi Muda**,Gajah Mada University Press,Yogyakarta.
- Napitupulu W.P.1969, **Dimensi-dimensi Pendidikan**,Grafika Grup Jabar,Unit II Cikapung,Bandung.
- Naning Ramdlang.1982,**Pendidikan Politik dan Regenerasi**,Liberty Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu,1987,**Pembangunan Management Masyarakat Tingga Landas**,Bina Aksara ,Jakarta.
- Pidarta Made,2007.**Landasan Kependidikan,Stimulus Ilmu Pendidikan Becorak Indonesia** Edisi 11,Rineka Cipta,Jakarta.
- Rudini & Hidayat.1989,**Sistem Politik Kehidupan Generasi Muda**,Balai PustakaJakarta.
- Sugiyono,2009.**Memahami Penelitian Kualitatif**.CV.Alfabeta,Bandung.
- Suryabrata Sumadi.1997,**Metodologi Penelitian**.PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Syaffie Inu Kencana, 1992.**Pengantar Ilmu Pemerintahan**. PT.Eresco,Bandung.
Usman Husaini & Akbar Purnomo Setiady,2004.**Metodologi Penelitian Sosial**,PT.Bumi
Aksara,Jakarta.